



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, BADAN
POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Plt Kepala BKKBN
Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Januari 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Peran program Generasi Berencana (GenRe) di Tahun 2015 dalam menghadapi bonus demografi; 2. Peran BKKBN dalam menghadapi persoalan pernikahan pada usia dini (dibawah umur); 3. Peran BKKBN dalam menghadapi persoalan remaja, seperti seks bebas, NAPZA dan penyebaran HIV/AIDS.
Ketua Rapat	: Pius Lustrilanang, SIP, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. orang dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala BKKBN beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diskors pada pukul 14.05 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB.

II. KESIMPULAN

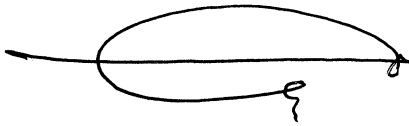
1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah dan BKKBN RI untuk segera menindaklanjuti Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 120/253/SJ terkait pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) menjadi urusan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Komisi IX menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Rapat Dengar Pendapat dengan BKKBN RI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah RI untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 12 ayat (2) dan lampiran huruf N dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan BKKBN RI, antara lain:
 - pengelolaan PKB/PLKB.
 - pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS Nasional.
 - pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
 - standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga PKB/PLKB.
4. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk menyusun *roadmap* tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN RI dan akan menjadikannya sebagai rujukan dalam memperjuangkan peningkatan anggaran BKKBN RI, termasuk anggaran untuk PKB/PLKB.
5. Untuk menghadapi permasalahan kependudukan di masa mendatang termasuk tantangan bonus demografi, Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk memperkuat advokasi, KIE, dan Penggerakan serta peningkatan dinamika kelompok di level RT, RW/dusun, dan Desa/Kelurahan melalui kerjasama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pelaku seni dan budaya; serta
 - e. pemuka agama/tokoh masyarakat.
6. Komisi IX mendorong BKKBN RI untuk melakukan sosialisasi program secara lebih gencar kepada masyarakat dengan melibatkan anggota Komisi IX DPR RI.
7. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk menyampaikan laporan dan data terkait:

- a. penyelenggaraan program Generasi Berencana (GenRe) termasuk indikator keberhasilan dari program tersebut.
 - b. indikator keluarga sejahtera yang digunakan untuk pendataan keluarga oleh BKKBN RI;
 - c. ketersediaan PKB/PLKB per Kabupaten/Kota;
 - d. peta pernikahan usia dini;
 - e. peta angka kematian ibu dan angka ibu hamil yang memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - f. peta angka balita dan lansia.
- paling lambat hari Selasa 10 Februari 2015.

8. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada Rapat Dengar Pendapat hari ini (Rabu 28 Januari 2015) paling lambat pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015.

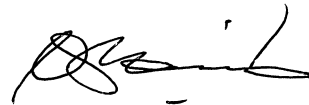
Rapat diakhiri pukul 17.00 WIB.

Plt KEPALA BKKBN,



Prof.dr. FASLI JALAL, Ph.D, SpGK

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



PIUS LUSTRILANANG, SIP, M.Si

A-380